



**POINTERS PESAN MENTERI
PADA
RAPAT KOORDINASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2016**
Nusa Tenggara Timur, 28 April 2016

Yang saya hormati:

1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Para Bupati dan Walikota;
3. Bupati Sumba Barat Daya, selaku Tuan Rumah;
4. Para Anggota DPRD tingkat I dan II di Provinsi NTT;
5. Bapak/Ibu Sekda atau yang mewakili;
6. Para Kepala Bappeda Provinsi;
7. Para Kepala Badan PP PA Provinsi;
8. Para Ketua P2TP2A Provinsi;
9. Pejabat Eselon I dan II Kementerian PP PA;
10. Hadirin dan undangan yang berbahagia.

Assalamu 'alaikum wr wb,

Selamat Sore dan Salam Sejahtera Bagi Kita semua

- Dalam kesempatan yang baik ini pada Puncak Acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP PA) Tahun 2016, di Provinsi NTT, tentunya kita mengucap puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini telah diberi kesehatan dan karunia Nya, serta diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti serangkaian acara yang telah dilaksanakan sejak pagi hari tadi.
- Pada 28 Maret–1 April 2016 lalu, Kementerian PP dan PA bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakornas PP PA) Tahun 2016 dengan melibatkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi seluruh Indonesia, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

- Tentunya kami menyambut baik pimpinan daerah, dalam hal ini Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya yang begitu cepat merespon dengan melakukan koordinasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal itu serupa telah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Bapak/Ibu dan Hadirin yang Berbahagia

- Seperti kita ketahui bersama bahwa, para Kepala Negara di dunia telah menyepakati *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan tujuan dari program pembangunan dunia untuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan. Di dalam 17 Goal yang telah disepakati, goal ke 5 adalah tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang mencakup:
 1. Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan
 2. Penurunan tingkat kekerasan
 3. Penghapusan praktek yang membahayakan pada perempuan
 4. Pengakuan atas pekerjaan yang tidak dibayar
 5. Perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan

6. Akses pada pelayanan kesehatan reproduksi
 7. Akses pada sumber daya ekonomi
 8. Peningkatan kemampuan dalam kemajuan teknologi
 9. Penguatan kebijakan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- Selain tercantum secara mandiri di goal ke 5, aspek kesetaraan gender juga tercantum pada kelima belas goal yang lain yang menyangkut kesejahteraan manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, kesetaraan gender merupakan salah satu kunci tercapainya SDGs ini.
 - Pada tanggal 14-18 Maret 2016, kami telah memimpin Delegasi Indonesia menghadiri Sidang *Commission on the Status of Women (CSW)* ke-60 di markas besar PBB, New York. Pertemuan tahun ini istimewa karena merupakan tahun pertama pelaksanaan SDGs dimana kesetaraan gender masih tetap menjadi salah satu prioritas yg tercantum dalam goal ke 5 dari SDGs. Pada hakekatnya kesetaraan gender ada pada semua goal dari SDGs yang ikut menentukan keberhasilannya. Kesetaraan gender pada semua aspek SDGs dibahas mulai dari pengentasan kemiskinan sampai pada peran media dan kerjasama internasional. Selanjutnya target SDGs Tahun 2015-2030 menuju *gender equality* melalui Planet 50:50 Tahun 2030.

- Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi perhatian di semua negara, akan pula menjadi prioritas di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bentuk, termasuk perdagangan orang juga menjadi bagian utama dari indikator SDGs, dimana semua negara telah bersepakat untuk menanganinya. Di Indonesia khususnya untuk Kementerian PP dan PA, penanganan kekerasan menjadi satu dari tiga prioritas utama pembangunan pemberdayaan perempuan, disamping penanganan perdagangan orang dan pemberdayaan ekonomi. 3 (tiga) program unggulan ini, kami kemas dalam *Three Ends*.
- Program Unggulan Kementerian PP PA 2016 yang diberi nama ***Three Ends*** meliputi:
 1. ***End Violence Against Women and Children*** (Akhiru Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak)
 2. ***End Human Trafficking*** (Akhiru Perdagangan Manusia)
 3. ***End Barriers To Economic Justice*** (Akhiru Kesenjangan Ekonomi)

Selanjutnya, *Three Ends* diharapkan dapat menjadi arah bagi Kementerian PP PA dan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam melaksanakan urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus sebagai tindak lanjut pemetaan dan penentuan program unggulan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan Kelembagaan, Perencanaan dan Penganggaran di daerah.

Bapak/Ibu dan Hadirin yang Kami Banggakan

- Capaian pembangunan manusia berdasarkan publikasi Human Development Report (HDR, UNDP 2014), bahwa nilai capaian IPM Indonesia sebesar 68,4 (peringkat 5 dari 10 negara Asean), dan peringkat 108 dari 187 negara.
- Selanjutnya menurut publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015 hasil kerjasama BPS dan KPP-PA, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT sebesar 62.26 (peringkat 31 dari 34 provinsi), sedangkan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92.76 yang menggambarkan bahwa **capaian perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki**, terutama dalam bidang rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita disesuaikan. Bila dibandingkan capaian nasional antara IPM (68.90) dan IPG (90.34), tentunya di Provinsi NTT masih diperlukan **peningkatan kualitas manusia secara umum**. Selanjutnya nilai capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) NTT sebesar 63.06

(peringkat 24 dari 34 provinsi), dengan demikian bila dibandingkan capaian nasional IPG (90.34) dan IDG (70.68) tentunya di Provinsi NTT masih diperlukan **peningkatan peran perempuan**. Hal ini tergambar hanya 9.23 persen perempuan yang duduk dalam parlemen.

- Kami yakin bahwa, NTT memiliki “mimpi” untuk bisa menyelesaikan “pekerjaan rumah” termasuk menyelesaikan persoalan lainya seperti isu (kekerasan, trafficking, diskriminasi dll). Untuk itu, melalui Rapat Koordinasi PP dan PA ini, diharapkan dapat dibangun koordinasi yang kuat antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan khususnya urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam mengatasi permasalahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai pada tingkat kabupaten dan bahkan Kecamatan/Desa.
- Tentunya saya sangat berharap dengan usainya Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi NTT ini, maka :
 - 1) Adanya sinkronisasi/kerterpaduan/keselarasan program dan kegiatan;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antar sektor, antar wilayah, dan antara pusat dan

daerah dengan mengacu pada program unggulan (*Three Ends*);

- 3) adanya rencana/target capaian pelaksanaan program/kegiatan program unggulan (*Three Ends*) pada tahun 2017 dari masing-masing para pemangku kepentingan;
- 4) implementasi dari hasil kesepakatan rencana tindak lanjut pemetaan urusan PP dan PA dikaitkan dengan Kelembagaan, Perencanaan dan Penganggaran; dan
- 5) pelaksanaan hasil rekomendasi/rencana tindak lanjut.

- Sekali lagi apresiasi dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan jajarannya, para kepala Unit PPPA dan KB Provinsi dan seluruh kabupaten/kota yang hadir, kepada seluruh peserta rakor PP dan PA yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu, serta para panitia yang telah mempersiapkan dari awal, pelaksanaan dan sampai berakhirnya kegiatan ini, kami mengucapkan selamat, semoga RAKORDA ini menghasilkan rekomendasi dan rumusan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang adil dan setara di berbagai bidang pembangunan, utamanya di Provinsi NTT.

- Demikian beberapa pesan dan arahan yang dapat kami sampaikan, Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta meridhoi upaya yang kita lakukan.

Terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb.

Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Yohana Susana Yembise